



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 85 TAHUN 2016

TENTANG

FORMASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Jenis Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur serta untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Tertentu perlu disusun Formasi Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
11. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan Sdr. Dr. H. Awang Faroek Ishak, M.M., M.Si., sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan HM. Mukmin Faisyal HP, SH., sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur Masa Jabatan 2008 – 2013;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);

13. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 67 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada RSUD AWS Syahrani Samarinda, Kanudjoso Balikpapan, Tarakan ;
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 72 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur;
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 73 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
16. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
17. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 14 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG FORMASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya disingkat SEKDA.
3. Staf Ahli adalah Jabatan yang secara nyata terdapat dalam susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas membantu Gubernur untuk memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak pegawai negeri sipil dalam suatu susunan organisasi negara, jabatan dilingkungan birokrasi pemerintahan terdiri dari jabatan Struktural dan Fungsional.

5. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.
6. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak Pegawai Negeri Sipil dalam suatu susunan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu dan bersifat mandiri.
7. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II

FORMASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

Pasal 2

Formasi Jabatan Fungsional Tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Formasi Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan untuk mengisi Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Sekretariat KPID, Sekretariat KORPRI, RSUD/RSKD, Satpol PP, Sekretariat KPID dan Kantor Penghubung Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 4

Formasi Jabatan Fungsional disusun berdasarkan analisis kebutuhan dan kategori Jabatan Fungsional yang diperlukan oleh Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Sekretariat KPID, Sekretariat KORPRI, RSUD/RSKD, Satpol PP, Sekretariat KPID dan Kantor Penghubung Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 5

Formasi Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan setiap Tahun Anggaran dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 6

Untuk pengisian Formasi Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan kemampuan Anggaran Daerah.

Pasal 7

Untuk pengisian Formasi Jabatan Fungsional Tertentu didasarkan pada Analisis Beban Kerja dan seleksi Administrasi oleh Lembaga yang menangani Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 8

Segala Pembiayaan untuk penetapan Formasi Jabatan Fungsional tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dibebankan pada APBD Provinsi Kalimantan Timur.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 22 Desember 2016

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 22 Desember 2016

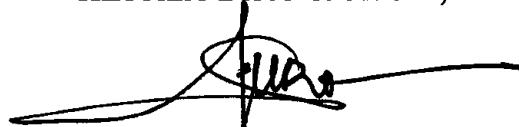
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. RUSMADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 87.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 85 TAHUN 2016
TENTANG FORMASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NO	INSTANSI/ NAMA JFT	KATEGORI JFT		JUMLAH
		AHLI	TERAMPIL	
1	Biro Hukum			16
	Perancang Peraturan Perundang-undangan	12		
	Pustakawan		3	
2	Analisis Kebijakan	1		7
	Biro Penataan Wilayah, Perbatasan dan Kerjasama			
	Penterjemah	3		
	Surveyor Pemetaan	3		
3	Analisis Kebijakan	1		6
	Biro Pemerintahan Umum			
4	Analisis Kebijakan	6		10
	Biro Keuangan			
	Pranata Komputer		6	
	Arsiparis		3	
5	Analisis Kebijakan	1		10
	Biro Umum			
	Arsiparis		6	
	Sandiman		3	
6	Analisis Kebijakan	1		1
	Biro Sosial			
7	Analisis Kebijakan	1		14
	Biro Pembangunan Daerah			
	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa	4		
	Pranata Komputer	3	6	
8	Analisis Kebijakan	1		13
	Biro Humas			
	Pranata Humas	3	3	
	Pranata Komputer		3	
	Penterjemah	3		
9	Analisis Kebijakan	1		6
	Biro Ekonomi			
10	Analisis Kebijakan	6		10
	Biro Perlengkapan			
	Pranata Komputer	6	3	
11	Analisis Kebijakan	1		1
	Biro Organisasi			
Total		58	36	94

NO	INSTANSI/ NAMA JFT	KATEGORI JFT		JUMLAH
		AHLI	TERAMPIL	
1	Dinas Kominfo			43
	Pranata Humas	6		
	Pranata Komputer	21	9	
	Pranata Humas		3	
	Arsiparis		3	
	Analisis Kebijakan	1		
2	Dinas Pertambangan			37
	Inspektur Tambang	24		
	Inspektur Ketenagalistrikan	3		
	Inspektur Minyak dan Gas Bumi	3		
	Pranata Humas		3	
	Arsiparis		3	
	Analisis Kebijakan	1		
3	Dinas Sosial			7
	Pranata Humas		3	
	Arsiparis		3	
	Analisis Kebijakan	1		
4	Dinas Kesehatan			7
	Pranata Humas		3	
	Arsiparis		3	
	Analisis Kebijakan	1		
5	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi			46
	Pengantar Kerja	6	3	
	Pengawas Ketenagakerjaan	15		
	Mediator Hubungan Industrial	15		
	Pranata Humas		3	
	Arsiparis		3	
	Analisis Kebijakan	1		
6	Dinas Peternakan			22
	Medik Veteriner	10		
	Paramedik Veteriner		5	
	Pranata Humas		3	
	Arsiparis		3	
	Analisis Kebijakan	1		
7	Dinas Pemuda & Olahraga			7
	Pranata Humas		3	
	Arsiparis		3	
	Analisis Kebijakan	1		
8	Dinas Pendidikan			8
	Pengawas Sekolah	1		
	Pranata Humas		3	
	Arsiparis		3	
	Analisis Kebijakan	1		
9	Dinas Pendapatan Daerah			13
	Pranata Komputer	6		
	Pranata Humas		3	
	Arsiparis		3	
	Analisis Kebijakan	1		

NO	INSTANSI/ NAMA JFT	KATEGORI JFT		JUMLAH
		AHLI	TERAMPIL	
10	Dinas Kelautan Perikanan			7
	Pranata Humas		3	
	Arsiparis		3	
	Analisis Kebijakan	1		
11	Dinas Kehutanan			7
	Pranata Humas		3	
	Arsiparis		3	
	Analisis Kebijakan	1		
12	Dinas Pertanian Tanaman Pangan			7
	Pranata Humas		3	
	Arsiparis		3	
	Analisis Kebijakan	1		
13	Dinas Perindagkop & UMKM			10
	Statistisi	3		
	Pranata Humas		3	
	Arsiparis		3	
	Analisis Kebijakan	1		
14	Dinas Perkebunan			7
	Pranata Humas		3	
	Arsiparis		3	
	Analisis Kebijakan	1		
15	Dinas Perhubungan			7
	Pranata Humas		3	
	Arsiparis		3	
	Analisis Kebijakan	1		
16	Dinas PU			25
	Penata Ruang	3		
	Pembina Jasa Kontruksi	3		
	Teknik Jalan dan Jembatan	3		
	Teknik Penyehatan Lingkungan	3		
	Teknik Pengairan	3		
	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan	3		
	Pranata Humas		3	
	Arsiparis		3	
	Analisis Kebijakan	1		
17	Dinas Pariwisata			7
	Pranata Humas		3	
	Arsiparis		3	
	Analisis Kebijakan	1		
	Jumlah	148	119	267

NO	INSTANSI/ NAMA JFT	KATEGORI JFT		JUMLAH
		AHLI	TERAMPIL	
1	Inspektorat Wilayah			89
	Auditor	55	15	
	Auditor Kepegawaian	2		
	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	10		
	Pranata Humas		3	
	Arsiparis		3	
	Analisis Kebijakan	1		
2	Badan Pendidikan dan Pelatihan			34
	Widyaiswara	24		
	Pranata Humas		3	
	Arsiparis		3	
	Pusatakawan		3	
	Analisis Kebijakan	1		
3	Bappeda			46
	Perencana	39		
	Pranata Humas		3	
	Arsiparis		3	
	Analisis Kebijakan	1		
4	Balitbangda			28
	Peneliti	21		
	Pranata Humas		3	
	Arsiparis		3	
	Analisis Kebijakan	1		
5	Badan Lingkungan Hidup			40
	Pengawas Lingkungan Hidup	15		
	Pengendali Dampak Lingkungan	18		
	Pranata Humas		3	
	Arsiparis		3	
	Analisis Kebijakan	1		
6	Badan Perpustakaan			109
	Pustakawan	60	39	
	Pranata Komputer		3	
	Pranata Humas		3	
	Arsiparis		3	
	Analisis Kebijakan	1		
7	Badan Arsip Daerah			19
	Arsiparis	4	11	
	Pranata Humas		3	
	Analisis Kebijakan	1		
8	Badan Kepegawaian Daerah			63
	Analisis Kepegawaian	5	21	
	Assesor SDM Aparatur	18		
	Pranata Komputer	6	6	
	Pranata Humas		3	
	Arsiparis		3	
	Analisis Kebijakan	1		

NO	INSTANSI/ NAMA JFT	KATEGORI JFT		JUMLAH
		AHLI	TERAMPIL	
9	Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal			7
	Pranata Humas		3	
	Arsiparis		3	
	Analisis Kebijakan	1		
10	Badan Kesbang dan Perlindungan Masyarakat			7
	Pranata Humas		3	
	Arsiparis		3	
	Analisis Kebijakan	1		
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			35
	Rescuer		28	
	Pranata Humas		3	
	Arsiparis		3	
	Analisis Kebijakan	1		
12	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan			27
	Penyuluh Pertanian	20		
	Pranata Humas		3	
	Arsiparis		3	
	Analisis Kebijakan	1		
13	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB			7
	Pranata Humas		3	
	Arsiparis		3	
	Analisis Kebijakan	1		
14	Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah			7
	Pranata Humas		3	
	Arsiparis		3	
	Analisis Kebijakan	1		
15	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes			7
	Pranata Humas		3	
	Arsiparis		3	
	Analisis Kebijakan	1		
	Jumlah	312	213	525

NO	INSTANSI/ NAMA JFT	KATEGORI JFT		JUMLAH
		AHLI	TERAMPIL	
1	RSUD A Wahab Syahrani			1700
	Dokter Spesialis	304		
	Dokter Gigi	6		
	Keperawatan	248	992	
	Kefarmasian	10	14	
	Kesehatan Masyarakat	2	4	
	Gizi	5	19	
	Keterapian Fisik	6	28	
	Keteknisian Medis	12	40	
	Pranata Humas		3	
	Arsiparis		3	
	Pustakawan		3	
	Analisis Kebijakan	1		
2	RSUD Kanudjoso Balikpapan			322
	Dokter Spesialis	36		
	Dokter Umum	11		
	Dokter Gigi	3		
	Keperawatan	20	180	
	Kefarmasian	3	9	
	Kesehatan Masyarakat	1	2	
	Gizi	3	9	
	Keterapian Fisik	3	12	
	Keteknisian Medis	5	18	
	Pranata Humas		3	
	Arsiparis		3	
	Analisis Kebijakan	1		
3	RSK Atma Husada Mahakam			127
	Dokter Spesialis	7		
	Dokter Umum	11		
	Dokter Gigi	2		
	Keperawatan		80	
	Kefarmasian	1	2	
	Kesehatan Masyarakat	1	1	
	Gizi	1	2	
	Keterapian Fisik	2	3	
	Keteknisian Medis	2	5	
	Pranata Humas		3	
	Arsiparis		3	
	Analisis Kebijakan	1		
4	Sekretariat Korpri (Klinik)			32
	Dokter Umum	3		
	Dokter Gigi	1		
	Keperawatan		16	
	Kefarmasian		1	
	Kesehatan Masyarakat	1		
	Gizi		1	
	Keterapian Fisik		1	
	Keteknisian Medis	1	1	
	Pranata Humas		3	
	Arsiparis		3	

NO	INSTANSI/ NAMA JFT	KATEGORI JFT		JUMLAH
		AHLI	TERAMPIL	
5	Satpol PP			287
	Polisi Pamong Praja		280	
	Pranata Humas		3	
	Arsiparis		3	
	Analisis Kebijakan	1		
6	Sekretariat DPRD			5
	Pranata Humas		3	
	Arsiparis		1	
	Analisis Kebijakan	1		
7	KPID			1
	Arsiparis		1	
8	Kantor Penghubung			2
	Pranata Humas		1	
	Arsiparis		1	
	Jumlah	716	1760	2476

NO	INSTANSI/ NAMA JFT	KATEGORI JFT		JUMLAH
		AHLI	TERAMPIL	
1	Dinas Kesehatan			59
	UPTD Akademi Keperawatan			
	Arsiparis		1	
	Pustakawan		1	
	UPTD Bapelkes			
	Widyaiswara	4		
	Arsiparis		1	
	UPTD Laboratorium Kesehatan			
	Dokter	1		
	Pranata Laboratorium Kesehatan	9	10	
	UPTD Balai Kesehatan Mata dan Olahraga Masyarakat			
	Perawat	4	8	
	Sanitarian	1		
	Perekam Medik	2		
	Dokter Spesialis Mata	5		
	Apoteker	1		
	Asisten Apoteker	4	1	
	Dokter	3		
	Refraksionis optisien	3		
2	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi			
	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang			65
	Penguji Mutu Barang	36	9	
	UPTD Metrologi			
	Penera	5	15	
	UPTD Pusat Pelatihan Pengembangan dan Promosi UKM			
3	Dinas Pendidikan			
	UPTD Pengembangan Kegiatan Belajar			35
	Pamong Belajar	35		
	UPTD Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus			31
	Guru PPKN	1		
	Guru Pendidikan Agama	1		
	Guru Bahasa dan Sastra Indonesia	3		
	Guru Bahasa Inggris	3		
	Guru Bahasa Jepang	1		
	Guru Bahasa Jerman	1		
	Guru Sejarah Nasional dan Umum	1		
	Guru Penjaskes	1		
	Guru Matematika	4		
	Guru Fisika	2		
	Guru Kimia	2		
	Guru Biologi	2		
	Guru Ekonomi	1		
	Guru Geografi	1		
	Guru Pendidikan seni budaya	1		
	Guru Sosiologi	1		
	Guru Teknik Informasi dan Komunikasi	1		
	Guru Muatan Lokal	1		
	Guru Bimbingan Konseling	3		

NO	INSTANSI/ NAMA JFT	KATEGORI JFT		JUMLAH
		AHLI	TERAMPIL	
4	Dinas Pemuda dan Olahraga			
	UPTD SKOI			11
	Guru Bimbingan Konseling	1		
	Guru Bahasa Asing	1		
	Guru IPA	1		
	Guru Agama Islam	1		
	Guru Akuntansi	1		
	Guru Bahasa Indonesia	1		
	Guru Bahasa Inggris	1		
	Guru IPS	1		
	Guru Matematika	1		
	Guru Kimia	1		
	Guru Agama Kristen	1		
5	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata			
	UPTD Taman Budaya			40
	Pamong Budaya	15	25	
6	Dinas Pertanian Tanaman Pangan			69
	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura			
	Pengawas Benih Tanaman	2	3	
	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura			
	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan	16	12	
	UPTD BBI Padi dan Palawija			
	Pengawas Benih Tanaman	2	3	
	UPTD BBI Hortikultura			
	Pengawas Benih Tanaman	2	3	
	UPTD Sekolah Pertanian Pembangunan			
	Guru PPKN	1		
	Guru Pendidikan Agama	1		
	Guru Bahasa dan Sastra Indonesia	2		
	Guru Bahasa Inggris	1		
	Guru Penjaskes	1		
	Guru Matematika	2		
	Guru Fisika	1		
	Guru Kimia	1		
	Guru Biologi	1		
	Guru IPS	1		
	Guru Keterampilan Komputer dan Pengelolaan informasi	1		
	Guru Pendidikan seni budaya	1		
	Guru K3LH			
	Guru Dasar-dasar budaya	1		
	Guru teknologi benih			
	Guru alat dan mesin pertanian	1		
	Guru Perlindungan tanaman	1		
	Guru tanah dan pemupukan			
	Guru teknologi Produksi Tanaman Pangan			
	Guru Teknologi Produksi Tanaman Hortikultura	1		
Guru Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan semusim	1			
Guru Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan tahunan	1			
Guru Teknik Penanganan pasca panen	1			
Guru Manajemen agribisnis	1			
Guru Klimatologi				
Guru Teknologi Komunikasi dan Penyuluhan Pertanian				
Guru Mulok/Kapita selekta	1			
Guru Pengembangan diri	1			
Guru BK	2			

NO	INSTANSI/ NAMA JFT	KATEGORI JFT		JUMLAH
		AHLI	TERAMPIL	
7	Dinas Sosial			70
	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan Samarinda			
	Pekerja Sosial		12	
	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma Samarinda			
	Pekerja Sosial		12	
	UPTD Panti Sosial Bina Remaja Samarinda			
	Penyuluh Sosial	10		
	UPTD Panti Sosial TWNP Samarinda			
	Pekerja Sosial		13	
	UPTD Panti Sosial TWMR Tanjung Selor			
Pekerja Sosial		13		
UPTD Panti Sosial KWHM Samarinda				
Penyuluh Sosial	10			
8	Dinas Perkebunan			14
	UPTD Pengawasan Benih Perkebunan			
	Pengawas Benih Tanaman	2	3	
	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan			
Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan	3	6		
UPTD Terapan Perkebunan				
9	Dinas Peternakan			90
	UPTD Pembibitan dan Inseminasi Buatan Api-api			
	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner			
	Medik Veteriner	30		
Paramedik Veteriner		60		
10	Dinas Kelautan dan Perikanan			21
	UPTD Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan			
	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan	1	1	
	UPTD Balai Benih Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar Balikpapan			
	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan	1	1	
	Penyuluh Perikanan	3	4	
UPTD Balai Benih Sentral Air Tawar Sebulu				
Pengendali Hama dan Penyakit Ikan	1	1		
Penyuluh Perikanan	4	4		
11	Dinas Kehutanan			123
	UPTD Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan			
	Penyuluh Kehutanan			
	Polisi Hutan	1	13	
	UPTD Pembinaan dan Pelestarian Alam			
	Penyuluh Kehutanan			
	Polisi Hutan	1	13	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan				
Penyuluh Kehutanan				
Polisi Kehutanan	1	13		
Pengendali Ekosistem Hutan				

NO	INSTANSI/ NAMA JFT	KATEGORI JFT		JUMLAH	
		AHLI	TERAMPIL		
12	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus				
	Penyuluh Kehutanan				
	Polisi Kehutanan	1	13		
	Pengendali Ekosistem Hutan				
	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongran				
	Penyuluh Kehutanan				
	Polisi Kehutanan	1	13		
	Pengendali Ekosistem Hutan				
	UPTD Pengelola Hutan Taman Raya Bukit Soeharto (Tahura)				
	Penyuluh Kehutanan				
	Polisi Kehutanan	1	13		
	Pengendali Ekosistem Hutan				
	UPTD Planologi Kehutanan Wilayah Tengah				
	Polisi Kehutanan	1	12		
	UPTD Planologi Kehutanan Wilayah Selatan				
	Polisi Kehutanan	1	12		
	UPTD Planologi Kehutanan Wilayah Utara				
	Polisi Kehutanan	1	12		
		Dinas Perhubungan			23
		UPTD SMK Pelayaran			
		Guru PPKN	1		
		Guru Pendidikan Agama	1		
		Guru Bahasa dan Sastra Indonesia	1		
		Guru Bahasa Inggris	1		
		Guru Penjaskes	1		
		Guru Matematika	1		
		Guru Fisika Teknologi	1		
		Guru Kimia Teknologi	1		
		Guru IPS	1		
		Guru Ketrampilan Komputer dan IT	1		
		Guru IPA	1		
		Guru Pendidikan seni budaya	1		
		Guru Kewirausahaan	1		
		Guru Muatan Lokal	1		
		Guru Keselamatan Kerja	1		
		Guru Teknologi Bahan			
		Guru Perbengkelan			
		Guru Desain dan Gambar Permesinan			
	Guru Listrik (elektrik)				
	Guru Prosedur Darurat				
	Guru Bahasa Inggris Maritim	1			
	Guru Mesin Penggerak Utama				
	Guru Permesinan Bantu				
	Guru Sistem Perawatan Mesin				
	Guru Perawatan Permesinan				
	Guru Konstruksi dan Stabilitas Kapal				
	Guru Hukum Maritim	1			
	Guru Isyarat Visual				
	Guru Permesinan Kapal				
	Guru Tali Temali	1			
	Guru Ilmu Pelayaran (terrester end)				
	Guru Sistem Navigasi Elektronik				
	Guru Sistem Kemudi dan Kompas	1			
	Guru Meteorologi	1			
	Guru P2TL dan Dinas Jaga	1			
	Guru Olah Gerak dan Pengendalian Kapal				
	Guru Penanganan dan Pengaturan Muatan				
	Guru Pencegahan Polusi				
	Guru Bimbingan Konseling	2			

NO	INSTANSI/ NAMA JFT	KATEGORI JFT		JUMLAH
		AHLI	TERAMPIL	
13	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi			60
	UPTD BLKI Balikpapan			
	Instruktur	5	10	
	UPTD BLKI Bontang			
	Instruktur	5	10	
	UPTD Pengembangan Produktifitas Daerah			
	Penggerak Swadaya Masyarakat	10	20	
14	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan			12
	UPTB Balai Pelatihan Pertanian			
	Widyaiswara	12		
	Jumlah	347	376	723

Salinansesuaidenganaslinya
 SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
 KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19620527 198503 1 006

Samarinda, 22 Desember 2016

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK